**EFEKTIVITAS PELAYANAN PERIZINAN**

**OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**DI KABUPATEN BIAK NUMFOR**

Sherin Evangelistha

NPP. 29.1832

*Asdaf Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua*

*Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: sherincallder@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Theproblems that are raised in the discussion this time are the number of business activities but only a few have business permits, even though if every business activity has a permit, of course it will greatly affect the amount of retribution collected in obtaining Original Local Government Revenue. **Purpose:** this study is to analyze and describe how the effectiveness of licensing services in increasing the Biak Numfor Local Own-Source Revenue and to analyze the efforts of the Biak Numfor Regency's Investment and One-Stop Integrated Service Office to streamline Licensing Services in the Context of Increasing Original Local Government Revenue in Biak Numfor. **Method:** This study activities are using the qualitative methods with theory of effectiveness Mardiasmo (2016:166) which describes the range of consequences and impacts (outcomes) of the program (outputs). **Results:** The resultsobtained from this study activity show the effectiveness of licensing services by the Office of Investment and One Stop Integrated Services in increasing Local Own-Source Revenue in Biak Numfor Regency can be said to be effective as seen from the increase in Original Local Government Revenue in Biak Numfor that occurred in 2021 which 46% came from retribution activities. **Conclusion:** It can also be seen in the dimensions of indicators starting from the program, which have not been able to implement all of them; achieving the vision through online-based services; the mission carried out is constrained by the number and quality of human resources; to the achievement of the Investment and One Stop Service Office of Biak Numfor Regency in 2019 even though it has limitations. Efforts made by the service in streamlining licensing services in addition to carrying out orders from local governments based on regional regulations, the service also makes efforts, one of which is by creating and carrying out work commitments for service employees. The suggestion to the Office is to recruit more competent and quality employees in running online-based services so that the service will no longer lack both in the number of employees and the quality of human resources, the next suggestion is to add computer facilities to support licensing service activities carried out by service.

***Keywords: Effectiveness, Licensing, Local Own-Source Revenue, Regional Retribution.***

**ABSTRAK**

**Permasalahan/ Latar Belakag (GAP) :** yang terjadi yang diangkat dalam pembahasan kali ini adalah banyaknya kegiatan usaha namun hanya sedikit yang memiliki izin usaha, padahal jika setiap kegiatan usaha memiliki izin tentunya akan sangat mempengaruhi besaran retribusi yang dipungut dalam memperoleh PAD.**Tujuan:** Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana efektivitas pelayanan perizinan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Biak Numfor serta menganalisis upaya dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor untuk mengefektifkan pelayanan perizinan dalam rangka meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Biak Numfor. **Metode:** Adapun dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan teori efektivitas Mardiasmo (2016:166) yang menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*outpu*t) program. **Hasil/ Temuan:** Diperoleh dari kegiatan penelitian pelayanan perizinan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Biak Numfor dapat dikatakan efektif dilihat dari kenaikan PAD yang terjadi pada tahun 2021 yang 46% bersumber dari kegiatan retribusi. **Kesimpulan:** Dapat dilihat pada dimensi indikator mulai dari program, yang belum bisa terlaksanakan semuanya; pencapaian visi melalui pelayanan berbasis online; misi yang dilaksanakan terkendala jumlah dan kualitas SDM; sampai kepada perolehan prestasi dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2019 meskipun memiliki keterbatasan. Upaya yang dilakukan oleh dinas dalam mengefektifkan pelayanan perizinan selain dengan menjalankan perintah dari pada pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah, dinas juga melakukan upaya salah satunya yaitu dengan menciptakan dan menjalankan komitmen kerja bagi para pegawai dinas. Adapun saran kepada pihak Dinas adalah untuk merekrut pegawai yang lebih berkompeten dan berkualitas dalam menjalankan pelayanan berbasis *online* sehingga dinas tidak akan kekurangan lagi baik dalam jumlah pegawai dan kualitas SDM, saran selanjutnya adalah melakukan penambahan fasilitas komputer agar menunjang dalam kegiatan pelayanan perizinan yang dilakukan oleh dinas.

**Kata Kunci: Efektivitas, Perizinan, PAD, Retribusi Daerah.**

1. **PENDAHULUAN**
   1. **Latar Belakang**

Pemerintah hadir pada hakekatnya adalah untuk melayani masyarakatnya, hal ini serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Rasyid (1998:139) bahwasanya “Pemerintah adalah pelayan masyarakat”. Sudah semestinya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya adalah pelayanan yang berkualitas. Pelayanan ialah salah satu dari fungsi pemerintah selain daripada fungsi pengaturan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan. Pemberian Pelayanan merupakan cara dari pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, seperti yang dituangkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa disebutkan tujuan dari membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dari uraian pengertian pelayanan publik di atas dapat digolongkan macam pelayanan publik meliputi; Pelayanan atas Barang, Pelayanan atas Jasa dan Pelayanan Administratif. Dapat dikatakan bahwa pelayanan administrasi adalah pelayanan yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat, mengapa demikian? administrasi sudah dilakukan contohnya pembuatan surat akta kelahiran. Begitupun ketika seseorang meninggal dunia, proses administrasi masih dilakukan contohnya pengurusan surat akta kematian, karena kegiatan pelayanan administrasi ini selalu bersama-sama dengan masyarakat maka pemerintah dalam memberikan pelayanan administrasi diharapkan tidak berbelit-belit dan memudahkan masyarakat serta mengandung asas-asas dari pelayanan publik seperti kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan/tindak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakukan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan kemudahan dan keterjangkauan.

Dinas Penanam Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dalam hal ini berurusan dengan pelayanan perizinan.

Sesuai tupoksi dari DPMPTSP yang dipaparkan di atas bahwasanya dinas ini merupakan dinas yang berhubungan dengan urusan investasi atau permodalan dan pengurusan perizinan yang berada di wilayah Kabupaten Biak Numfor, yang di mana berperan penting dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dikumpulkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan pelayanan perizinan yang dilakukan oleh dinas ini jika berjalan dengan baik tentu saja menjadi pintu gerbang bagi para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Biak Numfor.

* 1. **Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Terdapat beberapa fenomena permasalahan yang terjadi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Biak Numfor di dalam menjalankan pelayanannya, permasalahan tersebut berkaitan dengan pelayanan administrasi perizinan di Kabupaten Biak Numfor. Adapun permasalahan ini diperoleh dari pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Biak Numfor ketika peneliti melakukan kegiatan penelitian, beliau yang merupakan alumni dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN 02) mengatakan permasalahan yang terjadi terbagi menjadi permasalahan eksternal dan internal.

Permasalahan eksternal antara lain; (1) Para masyarakat yang belum paham dan sadar terkait legalitas sehingga malas untuk melakukan perurusan izin, kebanyakan masyarakat awam sebagai pelaku izin berpandangan bahwa pengurusan izin adalah sesuatu yang akan memakan waktu yang lama serta memiliki biaya yang tidak sedikit sehingga legalitas adalah sesuatu yang merepotkan bagi mereka. (2) Pengusaha lebih sibuk mengelola usahanya ketimbang dengan mengurus perizinan, ini disebabkan karena para pelaku usaha lebih memikirkan keuntungan yang diterima dari hasil penjualan dan tidak memikirkan resiko yang di akan diterima jika tidak memiliki izin. (3) Masyarakat belum terbiasa dengan sistem *online*, tidak semua kalangan masyarakat para pelaku izin adalah seorang yang paham dengan teknologi. (4) Lingkungan tempat tinggal yang berada di desa yang jauh dari tempat perizinan, banyak masyarakat yang membuka usahanya ataupun mendirikankan bangunan di daerah yang jauh dari pusat kota sehingga membuat mereka membutuhkan waktu dan biaya yang lebih untuk membuat izin.

Permasalahan internal antara lain; (1) Masih belum maksimal kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), selain dari pelaku usaha yang belum paham dengan teknologi para pekerja di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Biak Numfor pun masih ada yang belum paham dengan sistem *online* ini sehingga dalam pemberian pelayanan menjadi berpengaruh. (2) Belum maksimalnya sarana prasarana atau fasiltas, mengenai sarana dan prasarana diungkapkan juga oleh Bapak Kepala Dinas sebagian besar (80%) secara swadaya terutama untuk pelayanan seperti meja kerja dan meja rapat, komputer yang dibutuhkan 28 unit namun yang ada hanya 12 unit. (3) Belum maksimalnya alokasi anggaran, hal tersebut terjadi karena anggaran di luar dari gaji yang diterima pada tahun 2020 hanya sekitar Rp.264.000.000.00., sehingga untuk menjalankan program-program dari DPMPTSP sendiri menjadi terhambat. Jika di dalam pelaksanaan program-program menjadi tehambat ditambah juga dengan masalah sarana prasarana yang kurang akibat dari alokasi anggaran yang kurang, maka akan mempengaruhi dari efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

* 1. **Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2. 1  
 Daftar Penelitian Sebelumnya**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Judul Penelitian, Nama Peneliti, & Tahun Penelitian | Rumusan Masalah | Metode Penelitian | Kesimpulan Penelitian | Persamaan Penelitian | Perbedaan Penelitian |
| 1. | Vina Savinatunazah (2018), berjudul **“*Efektivitas Pelayanan Perizinan Berbasis Online Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis”****.* | Bagaimana efektivitas Pelayanan Perizinan Berbasis *Online* Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis? | Deskriptif Kualitatif | Efektivitas pelayanan perizinan dengan fokus perizinan berbasis sistem *online* secara umum telah berjalan, namun belum maksimal karena terdapat indikator yang belum terealisasi | Fokus terhadap efektivitas pelayanan perizinan, Tempat yang diteliti yaitu  (DPMPTSP)  Dan Metode Penelitian | Terfokuskan kepada Efektivitas perizinan online dan tidak ada sangkutan dengan PAD |
| 2. | Penelitian Khoriq Atus Sholihah (2020), berjudul ***“Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Berbasis Online Terhadap Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari)”*** | 1. Bagaimana Efektivitas penyeleng-   -garaan pelayanan perizinan usaha Kecil dan dan menengah berbasis online di Kecamatan Muara Bulian?   1. Bagaimana   persepsi pelaku usaha terhadap pelayanan perizinan berbasis online di Kecamatan Muara Bulian?   1. Bagaimana kebutuhan pengembang-an perizinan online di Kabupaten Batang Hari untuk masa mendatang? | Deskriptif Kualitatif | Hasil penelitian ini menjelaskan keseluruhan program yang dijalankan sudah baik namun dalam pencapaian tujuan belum dikatakan efektif karena terdapat kekurangan pada *service point* | Tempat yang diteliti yaitu  (DPMPTSP)  Dan Metode Penelitian | Terfokuskan kepada peneyeleng-  garaan perizinan terhadap UMKM dan tidak ada sangkutan dengan PAD |
| 3. | Penelitian Efrida Yanti Rangkuti (2019), berjudul ***“Efektivitas Program Sistem Administrasi Online Single Submission Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai”****.* | Bagaimana efektivitas program sistem administrasi OSS dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan usaha  di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota  Binjai? | Deskriptif Kualitatif | Hasil penelitian ialah kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menggunakan internet meskipun tata prosedur pelaksanaan sudah jelas | Tempat yang diteliti yaitu  (DPMPTSP)  Dan Metode Penelitian | Terfokuskan kepada efektivitas *OSS* dan tidak ada sangkutan dengan PAD |
| 4. | Penelitian Deswina Dede Pratiwi, Arie J. Rorong dan Joorie M. Ruru (2019), berjudul ***“Efektivitas Pelayanan Izin Usaha Perdagangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado”****.* | Bagaimana Efektivitas Pelayanan Izin Usaha Perdagangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado ? | Deskriptif Kualitatif | Terdapat belum optimalnya pelayanan yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado karena proses penyelesaian surat izin yang tidak tepat waktu dan masih terterdapat unsur kekerabatan dibanding pelayanan | Tempat yang diteliti yaitu  (DPMPTSP)  Dan Metode Penelitian | Terfokuskan kepada izin usaha perdagang  an dan tidak ada sangkutan dengan PAD |
| 5. | Penelitian Desy Amalia Ramadhani (2018), berjudul ***”Efektivitas Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service) Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar”****.* | *Bagaimana Efektivitas Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service) Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar?* | Deskriptif Kualitatif | Hasil dari penelitian ini juga dikatakan terdapat peningkatan kualitas | Tempat yang diteliti yaitu  (DPMPTSP)  Dan Metode Penelitian | Terfokuskan kepada izin mendirikan bangunan (IMB) dan tidak ada sangkutan dengan PAD |

*Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2021*

* 1. **Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian baharu dimana peneliti menggunakan informan yang lebih luas serta masalah dan penyelesaian yang ada khusus pada Kabupaten Biak Numfor yang berbeda dengan lokus penelitian sebelumnya yang lain.

* 1. **Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelayanan perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Biak Numfor.

1. **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif*.* Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian peneliti dengan lengkap dan runtut berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti menghimpun data dengan melakukan wawancara (*interview*), observasi (*observation*), dan dokumentasi (*taking notes*). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. **Hasil Dan Pembahasan**

**3.1.**  **Alokasi Anggaran**

Pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor tetap berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku yang di tetapkan oleh Dinas sendiri meskipun dalam hal anggaran tidak sepenuhnya teralisasi yang menyebabkan program pun menjadi terhalang untuk berjalan, permasalahan anggaran ini dikarenakan oleh dampak dari *Pandemi Covid-19.* Akibat dari dana yang minim Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor harus menggunakan dan seadaanya dalam pelayanannya, adapun dana yang di ajukan oleh Dinas pada tahun 2020 dan 2021 yaitu sebanyak Rp. 755.000.000 dan di tahun 2022 dan yang di ajukan menjadi RP. 825.000.000. namun tetap dana yang direalisasikan tidak mencapai yang di ajukan yaitu hanya sebesar Rp. 264.000.000.

**Tabel 4. 1**

**Pengajuan Anggaran Dan Realisasi Anggaran**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Anggaran Yang Diajukan | Realisasi Anggaran | Besaran Presentasi yang terealisasi |
| 2020 | Rp. 755.000.000 | Rp. 264.000.000 | 35% |
| 2021 | Rp. 755.000.000 | Rp. 264.000.000 | 35% |
| 2022 | Rp. 825.000.000 | Rp.264.000.000 | 32% |

*Sumber : Renja DPMPTSP Kab. Biak Numfor*

Diperkuat oleh pernyataan dari wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan Ibu Rona L Korwa selaku bendahara dari DPMPTSP Kab. Biak Numfor pada tanggal 17 Januari 2022 :

“Alokasi anggaran yang dimiliki oleh DPMPTSP pada dasarnya setiap tahunnya adalah berbeda sesuai dengan kondisi yang terjadi, pada tahun 2020 sendiri anggaran yang diusulkan adalah sebesar Rp 755.000.000 namun yang terealisasikan adalah sebesar Rp. 264.000.000 pada tahun tersebut sehingga program yang dijalankan oleh dinas pun hanya program rutin seperti administrasi perkantoran. Sudah 3 tahun kebelakang jika dihitung dengan tahun ini (2022) jumlah anggaran yang dimiliki oleh Dinas masih dan hanya sebesar Rp. 264.000.000 ini sendiri disebabkan karena adanya pemotongan anggaran Covid-19. Pengajuan anggaran untuk program sendiri memang sudah ditambah besarnya di tahun ini sekitar kurang lebih delapan ratus juta, sayangnya yang di peroleh masih sama dengan anggaran yang sebelumnya”

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Ibu Rona L Korwa selaku bendahara dari DPMPTSP Kab. Biak Numfor yang mana sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kepada Dinas pada wawancara sebelumnya, faktor anggaranlah yang mempengaruhi dalam jalannya suatu kegiatan dalam dinas ini sehingga DPMPTSP harus menjalankan kegiatan dengan meggunakan anggaran yang seadanya.

**3.2 Kelengkapan Sarpras**

Kelengkapan sarana dan prasarana tentu adalah hal yang menunjang seseorang dalam melakukan aktivitasnya, sama juga halnya dengan sebuah dinas yang mana dalam menjalankan kegiatan pelayanannya harus disertai dengan sarpras yang memadai pula, namun sayangnya di DPMPTPSP Kab. Biak Numfor di dalam kegiatan pelayanannya kelengkapan sarpas yang dimiliki tidak begitu maksimal apalagi mengenai komputer yang padahal sangat dibutuhkan dalam kegiatan pelayanan yang bersistem *online*.

**Tabel 4. 2**

**Barang yang Dibutuhkan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Barang | Jumlah Barang | Barang yang dibutuhkan |
| Komputer | 10 | 28 |

*Sumber : Dioleh Oleh Peneliti, 2022*

Komputer yang dibutuhkan oleh pegawai saat ini harusnya adalah sejumlah 28 buah namun yang ada hanyalah sebanyak 10 komputer saja padahal sebelumnya terdapat 12 komputer, dengan demikian indikator kelengkapan sarpras belum dikatakan terpenuhi karena harusnyalah komputer yang menjadi sumber penopang dalam kegiatan pelayanan *online* tercukupi supaya pegawai pun lebih merasa nyaman dalam melakukan pekerjaan maupun pelayanannya. Kekurangan komputer ini menyebabkan para pegawai harus menggunakan laptop pribadinya untuk kegiatan pelayanan.

**3.3 Kemudahan Perizinan *SiCantik* dan *OSS***

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor dalam kegiatan pelayanannya kepada masyarakat menggunakan 2 sistem yaitu dengan cara *offline* dan *online*, namun secara keseluruhan masyarakat masih menggunakan cara *offline.* Cara online yaitu dengan menggunakan *SiCantik* yaitu apliasi yang di gunakan khusus untuk perizinan nonberusaha serta *OSS* yang merupakan perizinan untuk segala kegiatan usaha yang menghasilkan, dasar dari perizinan berbasis *online* adalah Perpres No. 97 Tahun 2014 Tentang Perizinan dan Non-perizinan oleh PTSP wajib menggunakan pelayanan secara elektronik. *SiCantik Could* yang mendukung implementasi *OSS* untuk daerah di dasari dari Perpres No. 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. DPMPTSP Kab. Biak Numfor usahanya untuk menerapkan kegiatan pelayanan secara *online* dikatakan oleh Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Biak Numfor belum bisa karena masyarakat yang seluruhnya belum mengerti, berikut adalah wawancaranya yang di lakukan pada 14 Januari 2022 :

“Kegiatan pelayanan perizinan maupun non perizinan dilakukan secara ofline dan online hal ini karena situasi atau wajah dari pada masyarakat Biak Numfor yang masih banyak tidak mengerti dengan sistem online, sehingga masyarakat kebanyakan yang mengurus lebih suka datang langsung untuk membuat perizinan dengan demikian inilah yang harus dihadapi oleh dinas PTSP Kab. Biak Numfor untuk tetap memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.”

Sama juga di sampaikan oleh seorang masyarakat yang hendak membuat perizinan yang mana ketika di tanya mengenai penggunaan sistem *online* dikatakan bahwa belum bisa menggunakannya dan memang lebih baik datang kepada dinasnya langsung dengan membawa berkas yang lengkap. Padahal jika saja masyarakat sudah paham tentu kemudahan yang diberikan oleh dinas mengenai perzinan akan sangat membantu pelangannya. Berdasarkan hasil yang diperoleh di atas mengenai indikator kemudahan perizinan melalui *SiCantik* dan *OSS* pada dasarnya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah memberikan fasilitas pelayanan yang mempermudah masyarakat memperoleh izin namun dari segi masyarakatnya yang memang belum paham untuk mengoprasikan sistem tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa indikator ini sudah terpenuhi karena masyarakat pun merasakan kemudahannya sendiri, meskipun bukan mereka yang menggunakan sistem *online* tersebut.

**3.4 Jumlah Permohonan Perizinan**

Bagi masyarakat Biak Numfor dalam mengurus izin 4 tahun kebelakang yakni dari tahun 2018–2021 di dominasi oleh SITU, SIUP karena memang saat ini untuk kegiatan berusaha lebih banyak di lakukan oleh masyarakat Biak selanjutnya disusul oleh ijin lingkungan, kesehatan dan SIUJK artinya kegiatan tersebutlah yang paling banyak memberikan masukan retribusinya. Untuk kegiatan perizinan SITU sendiri tahun 2020 sampai tidak ada yang mengurus hal ini di jelaskan lebih lanjut oleh Kepala Bidang Perizinan Usaha Ibu Nur Widayawati pada 18 Januari 2022 sebagai berikut :

“ Pada tahun 2020 tidak ada yang mengurus perizinannya (SITU) dikarenakan tidak adanya kegiatan monitoring atau pemantauan terhadap para pengusaha, biasanya kegiatan ini melibatkan Satpol PP untuk melakukan sidak kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Biak Numfor, sehingga banyak masyarakat menjadi suka–suka saja”

Berikut adalah rekapitulasi hasil perizinan yang keluarkan oleh DPMPTSP Kab. Biak Numfor dalam beberapa tahun :

**Gambar 4. 1  
Grafik permohonan Perizinan Dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor**

*Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2022*

Berdasarkan data di atas maupun hasil wawancara bahwa ternyata kegiatan perizinan SITU cukup mempengaruhi dalam jumlah perizinan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP karena memang rata-rata masyarakat mengurus izin adalah untuk berusaha sehingga menyebabkan penurunan yang terjadi pada tahun 2020 sebelumnya oleh sebab itu perlunya kegiatan monitoring yang di lakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor agar kegiatan perizinan tetap berjalan dengan stabil dan meningkat sehingga berpengaruh terhadap PAD yang di kumpulkan oleh Kabupaten Biak Numfor.

**3.5 Jumlah Retribusi Yang Diperoleh**

Penjelasan dari Ibu Rona Laila Korwa selaku bendahara mengenai perolehan retribusi yang di tarik oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor *“Bahwa setiap tahun retribusi yang dikumpulkan oleh dinas memiliki besaran rata–rata mencapai angka 1 miliyar dan berkat penggunaan aplikasi SiCantik juga hasil retribusi yang diperoleh mencapai bahkan melebihi target yang di tentukan dinas”* Dari pernyataan yang di kemukakan oleh Ibu bendahara di atas dapat di informasikan bahwa hasil retribusi dari DPMPTSP dalam satu tahun sudah termasuk angka yang besar namun jumlah ini tetap tergantung dari berapa jumlah perizinan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP, jadi jika pada tahun 2020 bahwa jumlah dikeluarkannya perizinan hanya sebesar 1.771 sehingga retribusi yang di peroleh pun lebih kecil dari sebelumnya yaitu Rp 798.336.821 yang biasanya menyentuh angka sampai dengan 1 miliyar rupiah menjadi berkurang meskipun tetap melewati target.

Berikut ditampilkan jumlah retribusi yang diperoleh DPMPTSP Kab. Biak Numfor dari tahun 2018–2021 :

**Tabel 4. 3  
Rekapitulasi Jumlah Retribusi Yang Di Terima Oleh DPMPTSP**

**Kab. Biak Numfor Pada Tahun 2018 - 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **Tahun** | **Jumlah Retribusi** |
| 1 | 2018 | Rp. 1.148.102.411 |
| 2 | 2019 | RP.1.113.998.437 |
| 3 | 2020 | Rp 798.336.821 |
| 4 | 2021 | Rp.1.596.762.346 |

*Sumber DPMPTSP, 2022*

**3.6 Jumlah PAD Yang Diterima**

Retribusi yang di ambil dari kegiatan perizinan maupun non perizinan oleh DPMPTSP kemudian disalurkan kepada PAD Kabupaten Biak Numfor yang di kumpulkan oleh Bappenda memiliki jumlah yang berbeda setiap tahun, adapun jumlah Pendapatan Asli Daerah yang diterima Kabupaten Biak Numfor memiliki kisaran rata-rata 3-4 Miliyar per tahun, berikut ditampilkan jumlah PAD dari Kabupaten Biak Numfor :

**Tabel 4. 4  
Penerimaan PAD Kabupaten Biak Numfor Dari Sumber Retribusi Tahun 2018 - 2021**

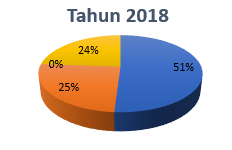
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Tahun** | **Usulan Anggaran** | **Realisasi anggaran** | **Retribusi** | **Total PAD** |
| 1 | 2018 |  |  | Rp.1.148.102.411 | Rp.4.587.922.431 |
| 2 | 2019 |  |  | RP.1.113.998.437 | RP.3.731.789.665 |
| 3 | 2020 | Rp.755.000.000 | Rp.264.000.000 | Rp 798.336.821 | Rp. 2.548.758.216 |
| 4 | 2021 | Rp.755.000.000 | Rp. 264.000.000 | Rp.1.596.762.346 | Rp. 3.443.682.137 |

Sumber : *BAPPENDA KABUPATEN BIAK NUMFOR*

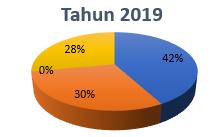
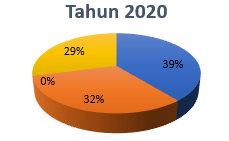
Ditunjukkan dari data tersebut bahwa meskipun realisasi anggaran tidak sesuai dengan yang diusulkan, DPMPTSP mampu menghasilkan angka retribusi cukup besar yang disalurkan untuk membantu dalam perolehan PAD di Kabupaten Biak Numfor. Perolehan PAD tentunya tidak terlepas dengan sumber-sumber yang lain, selain dari pada kegiatan retribusi yang dikumpulkan melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP. Berikut ini adalah tabel yang menunjukan perolehan PAD Kabupaten Biak Numfor berdasarkan dari pada seluruh sumbernya.

Berdasarkan dari keseluruhan sumber-sumber PAD di Kabupaten Biak Numfor jika dimasukan dalam diagram persentase di bawah ini, terlihat bahwa pada tahun 2021 total PAD adalah sebesar Rp.3.443.682.137 dengan di dominasi oleh kegiatan retribusi daerah sebesar 46% kemudian disusul oleh pajak daerah sebesar 29% dan lain-lain PAD yang sah dengan presentase 25%. Diagram persentase ini juga menunjukan bahwa setiap tahunnya tingkat persentase dari retribusi daerah dalam pemasukan PAD selalu bertumbuh meskipun besaran angkanya pada tahun 2019-2020 dan total keseluruhan PAD menurun yakni bisa dilihat pada tahun 2018 retribusi daerah sebesar 25% kemudian menjadi 30% pada tahun 2019 dan sebesar 32% di tahun 2020, akhirnya pada tahun 2021 ialah sebesar 46% yang bersumber dari retribusi daerah.

**Gambar 4. 2  
Diagram Persentase Total PAD Kabupaten Biak Numfor**

**Berdasarkan Sumber-Sumbernya Tahun 2018-2021**

**Rp.4.587.922.431**



**RP.3.731.789.665**

**Rp.2.548.758.216**

**Rp.3.443.682.137**

Keterangan :

Sumber *: Diolah Oleh Peneliti, 2022*

### **3.7 Upaya Yang Dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Untuk Mengefektivkan Pelayanan Perizinan**

Kegiatan pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor mampu membantu dalam meningkatkan PAD dari retribusi yang disalurkan, namun di dalam beberapa indikator masih terdapat kendala atau hambatan dalam Dinas ini melakukan pelayanannya. Misalnya seperti program yang tidak berjalan akibat dana yang minim, sampai dengan SDM yang tidak semuanya paham akan sistem *online* serta kurangnya komputer untuk kegiatan pelayanan.

**Tabel 4. 5  
Macam Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor Dalam Melakukan Pelayanan Perizinan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **Indikator** | **Kendala** |
| 1. | Program | Tidak berjalan karena minimnya anggaran |
| 2. | Misi | Kualitas dan jumlah SDM yang kurang |
| 3. | Alokasi Anggaran | Anggaran yang teralisasikan tidak mencukupi karena *refocusing* |
| 4. | Kelengkapan Sarpras | Komputer yang kurang |
| 5. | Jumlah Permohonan Perizinan | Tidak adanya kegiatan monitoring kepada masyarakat. |

*Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2022*

Dari tabel di atas dapat dilihat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numforyang mana dari pihak dinas terkait sudah ada yang dilakukan upaya untuk mengefektivkan kegiatan pelayanan perizinan dalam memperoleh peningkatan PAD di Kabupaten Biak Numfor.

Tidak hanya dari sisi pihak dinas yang melakukan usaha untuk mengefektifkan kegiatan perizinan sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Biak Numfor, namun dari pihak pemerintah daerah juga memberikan kontribusinya sebagai upaya untuk tercapainya peningkatan PAD. Hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara mengeluarkan peraturan daerah atau Perda Kabupaten Biak Numfor Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Retribusi Perizinan Saranan Pelayanan Kesehatan Swasta dan Tempat-Tempat Umum, yang mana peraturan ini mengatur tentang penarikan dan pembayaran retribusi objek pelayanan kesehatan swasta maupun tempat umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah di mana DPMPTSP menjadi tempat bagi masyarakat untuk membayarkan retribusinya. Adanya korelasi antara pemerintah daerah dan DPMPTSP ini bentuk dari usaha pemerintah daerah agar masyarakat lebih mudah dalam pembayaran retribusi dalam hal pelayanan kesehatan dan sebagai acuan atau regulasi bagi dinas sendiri dalam menjalankan tupoksinya karena hal ini berhubungan dengan pelayanan kesehatan yang mana biasanya masyarakat awam pada umumnya mengira bahwa pembayaran retribusi mengenai pelayanan kesehatan pastinya berhubungan dengan intansi kesehatan langsung.

**3.8 Diskusi Temuan Utama**

Adapun hasil dari penelitian ini berbeda dengan penelitian penelitian yang sebelumnya karena sebelumnya belum ada yang disangkutkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan dari efektivitas pelayanan perizinan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di atas, hal tersebut memiliki kesesuaian dengan teori efektivitas dari ahli yang dikemukakan oleh Beni (2016:69) yang mana menurut beliau merupakan keterkaitan hubungan antara output dengan tujuan sehingga dapat dikatakan efektif apabila sudah memiliki pengaruh. Dapat dilihat pengaruh dari retribusi yang di salurkan kepada BAPENDA dalam kas Pendapatan Daerah yang turun ketika retribusi yang diterima turun pula.

1. **KESIMPULAN**

Setelah melaksanakan kegiatan penelitian yang di lakukan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Biak Numfor, dengan menggunakan teknik pengambilan data berupa; wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti dapat menyimpulkan serta berdasarkan teori efektivitas Mardiasmo (2016) maka dapat disimpulkan:

1. Pelayanan perizinan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Biak Numfor dapat dikatakan efektif terlihat dari total PAD yang diterima mengalami kenaikan sebesar Rp.3.443.682.137 yang mana besaran kenaikan PAD di Kabupaten Biak Numfor ini berasal dari kegiatan retribusi daerah dengan besaran persentasi yaitu 46% atau sebesar Rp.1.596.762.346 di tahun 2021. Juga efektivitas ini dapat terlihat dari beberapa dimensi lain berdasarkan indikator seperti; program yang dijalankan ternyata belum semuanya bisa terlaksanakan; terjadinya pencapaian visi melalui pelayanan berbasis *online* yang dilakukan oleh dinas; adapun misi yang dilaksanakan masih terkendala jumlah dan kualitas SDM; peningkatan Indikator Kerja Kunci (IKU); alokasi anggaran yang realisasinya belum sesuai dengan apa yang dianggarkan namun mampu memberikan sumbangsih dalam perolehan PAD; masih kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana; sampai kepada perolehan prestasi dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2019.
2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengefektifkan pelayanan perizinan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Biak Numfor antara lain dengan menciptakan komitmen kerja, rencana bimtek, mencukupkan anggaran dengan kegiatan, menggunakan laptop pribadi pegawai sampai kepada dilakukannya kegiatan penyidakan dari pihak dinas kepada masyarakat. Peranan dari pihak pemerintah daerah sendiri adalah dengan diberlakukannya regulasi atau peraturan yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam proses pembayaran retribusi melalui DPMPTSP yaitu dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor No 7 Tahun 2005 yang mana sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD.

**4.1. Keterbatasan Lituratur**

Dalam Kegiatan Penelitian ini terdapat hambatan yang menyebabkan keterbatasan anatara lain tidak adanya penelitian yang terdahulu yang yang dilakukan yang berhubungan dengan peningkatan terhadap PAD dari pada kegiatan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**4.2. Arah Masa Depan Literatur**

Tujuan dari kegiatan penelitian dan penulisan ini adalah agar mampu menganalisis upaya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor untuk mengefektifkan pelayanan perizinan dalam rangka meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Biak Numfor, yang nantinya menjadi bahan acuan untuk memperbaiki kegiatan pelayanan yang sekiranya dianggap masih kurang dan masih terdapat keterbatasan dan kendala.

**VI . UCAPAN** **TERIMA** **KASIH**

Ucapan terima kasih terutama kepada Tuhan Yesus Kristus dan kepada orang tua serta saudara-saudara peneliti, tak lupa juga ucapan terimakasih ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

1. **DAFTAR PUSTAKA**
2. **Buku**

Adkon, Riduwan. 2006. *Metode dan Teknik Menyusun Tes*is. Bandung: Alfabeta.

Arikunto, S. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Deddy Mulyana, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif,* Remaja Rosdakarya. Handayaningrat, Soewarno. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan*

*Manajemen.* Jakarta: CV. Haji Masagung.

Khaerul Umam. 2012. *Perilaku Organisasi Bandung*: Pustaka Setia. Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta. STIE YKPN Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor*

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Simangunsong. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*.Bandung: ALFABETA.

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat

Undang-Undang No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah No 23 Tahun 2014 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Bupati Biak Numfor No 104 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Biak Numfor.